



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.1376, 2015

BAPETEN. Indikator Kinerja Utama.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
TAHUN 2015-2019  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015-2019 perlu dilakukan penajaman dan pengoptimalisasian atas perencanaan kegiatan yang berpengaruh terhadap penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah diubah tujuh kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008

tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015-2019;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2015-2019.

#### Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir 2015-2019 yang selanjutnya disingkat IKU BAPETEN 2015-2019 merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan pada Rencana Strategis BAPETEN 2015-2019;
- (2) IKU BAPETEN 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.

#### Pasal 2

IKU BAPETEN 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi setiap unit organisasi eselon I, unit organisasi eselon II dan unit kerja mandiri di lingkungan BAPETEN untuk:

- a. menetapkan rencana kerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun perjanjian kinerja; dan
- d. menyusun laporan kinerja.

#### Pasal 3

- (1) Penyusunan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan oleh setiap unit organisasi eselon I, unit organisasi eselon II dan unit kerja mandiri di lingkungan BAPETEN.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BAPETEN melalui Inspektorat.

- (3) Inspektorat dalam menerima laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
- a. melakukan evaluasi dan reviu; dan
  - b. melaporkan hasil evaluasi dan reviu kepada Kepala BAPETEN.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a  
pada tanggal 17 Maret 2015  
KEPALA BADAN PENGAWAS  
TENAGA NUKLIR,

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

## LAMPIRAN

## PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

## NOMOR 4 TAHUN 2015

## TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWAS TENAGA  
NUKLIR TAHUN 2015-2019

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

1.	Nama Organisasi	:	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	
2.	Tugas	:	melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	
3.	Fungsi :			
	a.	pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir;		
	b.	koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETEN;		
	c.	fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir; dan		
	d.	penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.		
4.	Indikator Kinerja Utama :			
NO.	URAIAN	ALASAN	SUMBER DATA	
a.	Indeks angka kejadian keselamatan nuklir (skala INES: 1 - 7)	Mengukur tingkat kejadian kecelakaan radiasi yang signifikan.	Laporan kejadian keselamatan nuklir .	

b.	Indeks kepuasan Masyarakat (dari skala 4)	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang terkait penggunaan pemanfaatan tenaga nuklir.	Hasil survey terhadap kepuasan masyarakat.
c.	Jumlah kejadian keamanan nuklir yang signifikan	Mengukur kejadian penyalahgunaan Zat Radioaktif atau Bahan Nuklir.	Laporan kejadian keselamatan nuklir dan / atau Laporan pembacaan <i>Radiation Portal Monitor (RPM)</i> .
d.	Jumlah kasus penyalahgunaan bahan nuklir	Menghitung jumlah penyalahgunaan bahan nuklir.	Laporan kejadian keselamatan nuklir dan / atau Laporan pembacaan <i>Radiation Portal Monitor (RPM)</i> .
e.	Tingkat Kesesuaian Pengawasan Safeguards BAPETEN dengan hasil Pengawasan Safeguards IAEA (%)	Mengukur Tingkat kesesuaian pengawasan Safeguards.	Laporan pengawasan safeguards.
f.	Prosentase pekerja radiasi yang menerima dosis radiasi lebih dari 1 mSv (%)	Mengukur dosis pekerja radiasi.	Laporan evaluasi dosis.
g.	Tingkat pelanggaran pengguna terhadap ketentuan keselamatan, keamanan dan safeguards (%)	Menghitung jumlah pelanggaran oleh pengguna.	Laporan Hasil Inspeksi.
h.	Indeks kepuasan pengguna (dari skala 4)	Mengukur tingkat kepuasan pengguna pemanfaatan tenaga nuklir.	Hasil survey kepuasan pengguna.

i.	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja (LAKIP) (dari skala AA)	Mengukur kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan ketenaganukliran.	Hasil evaluasi Lapkin BAPETEN.
j.	Indeks Reformasi Birokrasi (Skor 1 - 100)	Mengukur pelaksanaan Reformasi Birokrasi BAPETEN.	Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi.
k.	Opini atas Laporan Keuangan	Mengukur kinerja organisasi dalam pengelolaan keuangan Negara.	Laporan Keuangan BAPETEN.
l.	Indeks Profesional ASN (Skor 1 – 100)	Mengukur tingkat Profesional ASN BAPETEN.	Laporan pelaksanaan organisasi yang profesional.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

JAZI EKO ISTIYANTO